KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Dinasti Politik Mewarnai Parlemen
**Tanggal** : Rabu, 25 September 2024
**Surat Kabar** : Kompas
**Halaman** : 3

# Dinasti Politik Mewarnai Parlemen

Banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang berkaitan dengan dinasti politik semakin menambah pesimisme bakal ada perbaikan kinerja DPR ke depan.

**JAKARTA, KOMPAS —** Dinasti politik kian merajalela di kalangan anggota DPR 2024-2029. Hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi menemukan sedikitnya 79 anggota DPR terpilih terindikasi berkaitan dinasti politik atau punya kekerabatan dengan pejabat lainnya. DPR menjadi tempat berkumpulnya suami, istri, anak, hingga sanak saudara elite politik.

Sumber data penelitian Formappi berasal dari informasi anggota DPR terpilih yang dikumpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak pencalonan. Namun, Formappi menilai data yang dicatat tergolong kurang lengkap dan tidak bisa diidentifikasi lebih dalam lagi, contohnya riwayat pekerjaan.

Peneliti senior Formappi, Lucius Karus, mengatakan, hasil riset menunjukkan DPR periode mendatang tak bakal banyak berubah. Banyaknya legislator terpilih yang berkaitan dengan dinasti politik kian menambah pesimisme terhadap perubahan DPR menjadi lebih baik. Kondisi ini justru meningkatkan peluang terjadinya korupsi dan kolusi.

"Jenis kekerabatan beragam, ada yang suami, istri, anak, dan saudara-saudara dengan politisi, penguasa daerah, elite partai. Yang paling banyak adalah anak pejabat. Lama-lama bisa saja ada grup arisan keluarga di DPR," ujar Lucius saat rilis anatomi anggota DPR terpilih bertajuk "DPR Baru, Lebih Baik atau Lebih Buruk" secara hibrida di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Anggota DPR yang saling berkerabat contohnya kader Partai Gerindra, Ahmad Muzani dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I dan Himmatul Aliyah dari Dapil Jakarta I yang merupakan pasangan suami-istri. Keduanya bersama-sama menjadi wakil rakyat sejak 2019.

Pasangan suami-istri lainnya dari Gerindra adalah Marlyn Maisarah (Jawa Barat V) dan Sugiono (Jawa Tengah I) serta Mulan Jameela (Jawa Barat XI) dan Ahmad Dhani (Jawa Timur I).

Ada juga dari Partai Nasdem, yakni Julie S Laiskodat (Nusa Tenggara Timur/NTT I) dan Viktor B Laiskodat (NTT II). Nama Viktor muncul dari pergantian Nasdem terhadap Ratu Ngadu Bonu Wulla yang memutuskan mundur sebagai anggota DPR terpilih.

Pasangan lainnya dari Nasdem adalah Fatmawati Rusdi (Sulawesi Selatan I) dan Rusdi Masse Mappasessu (Sulawesi Selatan II). Namun, Fatmawati kini memutuskan untuk bertarung sebagai calon wakil gubernur Sulawesi Selatan di Pilkada 2024.

Selain hubungan suami-istri, ada juga yang berhubungan orangtua dan anak. Contohnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang merupakan anak dari Said Abdullah. Ayah-anak itu bakal bekerja bersama di Gedung DPR. Lalu, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani (PDI-P) yang merupakan anak dari Puan Maharani, politisi PDI-P yang juga putri dari Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Menurut Lucius, sejumlah nama kerabat dekat yang kini sama-sama menjadi anggota DPR bakal mengganggu kerja-kerja lembaga legislatif. Ini juga mencitrakan orang yang bisa duduk sebagai wakil rakyat harus memiliki darah, kerabat, atau hubungan spesial dengan pihak berpengaruh. Kesempatan bagi masyarakat biasa untuk menang kian sempit.

"Dalam kasus yang ekstrem, di tengah wacana penambahan komisi di DPR, bisa saja kerabat-kerabat menumpuk di satu komisi. Mereka merumuskan aturan yang sejalan dengan kepentingan mereka saja," tutur Lucius.

## Dominasi petahana

Pembedahan data anggota DPR 2024-2029 terpilih, lanjut Lucius, menemukan dominasi legislator petahana sebanyak 325 orang. Sementara anggota DPR yang baru hanya 255 orang. Kondisi ini tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2019 yang memenangkan 321 orang petahana.

Melihat hal itu, Formappi pesimistis bakal ada perbaikan dalam tubuh DPR periode mendatang. Kinerja buruk DPR 2019-2024 bakal menghantui. Para wakil rakyat hanya bertugas menjadi "tukang stempel" aturan yang diinginkan oleh pemerintah.

"Data terkait jumlah kursi yang menunjukkan tidak adanya parpol yang dominan di parlemen selalu membuka peluang terjadinya banyak negosiasi, kompromi, hingga kongkalingkong. Data tersebut juga membuka jalan bagi kekuasaan koalisi," kata Lucius.

Dari delapan partai politik di parlemen, hanya PDI-P yang belum menyatakan dukungan untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dengan demikian, hanya 110 kursi anggota DPR yang belum menentukan sikap. Sementara 470 kursi DPR milik partai politik didominasi koalisi besar pemerintah.

Pada akhir April 2024, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga merilis temuan serupa. Bedanya, CSIS menemukan 50 dari 87 calon anggota DPR berusia di bawah 40 tahun yang berpeluang besar lolos terasosiasi dengan dinasti politik. Hal tersebut merupakan dampak dari mahalnya biaya politik dan keunggulan yang dimiliki calon anggota legislatif petahana.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes menuturkan, anak muda yang maju dan menang dalam Pemilu Legislatif 2024 tak terlepas dari latar belakang hubungan anak, adik, kakak, istri, suami, keponakan, dan lainnya dari pejabat politik. Fenomena dinasti politik dari anak muda yang maju dan menang dalam Pemilu Legislatif 2024 tak terlepas dari mahalnya biaya politik nasional.

"Teman-teman caleg umumnya mulai karier politik tak instan. Bertarung di DPR ini tak mudah, apalagi angka keterpilihan petahana meningkat. Kemudian, anak-anak muda juga bertarung dengan yang punya privilese tinggi," tuturnya. (WIL/BOW/NIA)